



SALINAN

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah akses bagi publik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan dan perlindungan terhadap arsip dinamis secara prinsip cepat, tepat, dan aman di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
4. Unit Pengolah adalah unit kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
5. Unit Kearsipan adalah pengelola arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan berada di Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan, Biro Umum.
6. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta

keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.

7. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
8. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
9. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan Klasifikasi Keamanannya.
10. Arsip Biasa adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
11. Arsip Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
12. Arsip Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.

Pasal 2

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis dimaksudkan untuk:
 - a. mendorong unit kerja agar memberkaskan Arsip Dinamis unit kerjanya secara tertib; dan
 - b. memberikan petunjuk kepada unit kerja agar mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap Klasifikasi Arsip yang telah ditetapkan.
- (2) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis bertujuan untuk:

- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan Arsip Dinamis; dan
- b. menyediakan layanan informasi Arsip Dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, dan aman.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis ini mencakup:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
- b. Pengamanan Arsip Dinamis; dan
- c. pengaturan Akses Arsip Dinamis.

Pasal 4

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis substantif; dan
 - b. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis fasilitatif, meliputi:
 1. fasilitatif keuangan; dan
 2. fasilitatif kepegawaian.
- (2) Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta

prosedur, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana.

BAB II KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Arsip Biasa;
 - b. Arsip Terbatas; dan
 - c. Arsip Rahasia.
- (2) Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dalam teknis pengamanan dan akses.

Pasal 7

Arsip Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 8

Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan arsip yang memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 9

Arsip Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 10

- (1) Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat lunak.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sarana penyimpanan arsip berupa rak arsip dan lemari arsip; dan
 - b. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.
- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aplikasi pengelolaan Arsip Dinamis.

BAB III PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 11

Pengamanan Arsip Dinamis dilakukan melalui pengamanan ruang simpan dan penentuan pengelola arsip.

Pasal 12

Pengamanan ruang simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa pemasangan kamera pengawas, kunci pengamanan ruangan, dan media penyimpanan arsip.

Pasal 13

- (1) Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan, dan pengelola Arsip di unit kerja.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pengamanan dan penetapan hak Akses Arsip di Pusat Arsip.

Pasal 14

- (1) Pengamanan Arsip Dinamis disesuaikan dengan Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Arsip Biasa disimpan pada rak arsip.
- (3) Arsip Terbatas dan Arsip Rahasia disimpan pada lemari arsip.
- (4) Arsip Rahasia dikelola oleh Pejabat Fungsional Arsiparis.

BAB IV PENGATURAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 15

Arsip Dinamis dapat diakses oleh pengguna internal dan pengguna eksternal.

Pasal 16

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. penentu kebijakan, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya;
 - b. pelaksana kebijakan, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa dan terbatas; dan
 - c. pengawas internal, mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna eksternal meliputi:
 - a. publik, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip dengan tingkat Klasifikasi biasa;
 - b. pengawas eksternal, mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 17

- (1) Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan pejabat pimpinan tinggi.
- (2) Pejabat pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan pejabat administrator atau eselon III.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan auditor dari unit kerja Inspektorat.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
- (5) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri atas aparat kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Tartunyan Handayani
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196605311991032001

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I	Kebijakan yang berkaitan dengan bidang Instalasi dan Bahan Nuklir, Reaktor Daya/non Daya, Nuklir non Reaktor, Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, limbah nuklir, pengangkutan Bahan Nuklir meliputi: <ul style="list-style-type: none">- Naskah akademik/Telaah kajian- Analisa data dan informasi- Kajian dan Analisa	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DP2FRZR, DP2IBN, P2STPFRZR, P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Usulan kebijakan - Rekomendasi - Rumusan dan penyusunan materi/bahan kebijakan Masukkan dan dukungan dalam Penyusunan kebijakan - Rancangan kebijakan - Penetapan dalam bentuk NSPK 					
II	PERATURAN PENGAWASAN TENAGA NUKLIR					
1	BIDANG INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR					
	a. Naskah yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan dan penegakan peraturan keselamatan reaktor nuklir					
	Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan Bidang Ketenaganukliran) <ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan/Jadwal Rapat - Surat Pengajuan PROLEGNAS/Izin Prakarsa 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DP2IBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen Rapat - SK Tim - SK PAK/L - Daftar Literatur - Dokumen Hasil Identifikasi Peraturan - Dokumen Terjemahan - Rancangan Awal Naskah Akademis - Rancangan Awal Undang-Undang 					
b. Naskah yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan dan penegakan peraturan keselamatan non reaktor nuklir						
	Pembentukan, Pembinaan dan Evaluasi Peraturan BAPETEN terkait Instalasi Nuklir Non Reaktor <ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan/Jadwal Rapat - Notulen Rapat - SK Tim - SK PAK/L - Daftar Literatur - Dokumen Hasil Identifikasi Peraturan 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DP2IBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Terjemahan - Rancangan Naskah Urgensi/Policy Paper - Draft Hasil Pembahasan Peraturan BAPETEN/Draft Final Peraturan BAPETEN - Laporan hasil Konsultasi Publik - Laporan pelaksanaan pembinaan - Laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembinaan 					
2	BIDANG FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF					
	Naskah yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan dan pembinaan rancangan undang-undang					
	Penyusunan dan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan Bidang Ketenaganukliran) di Bidang Penelitian dan Industri serta Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan/Jadwal Rapat - Notulen Rapat 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DP2FRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - SK Tim - Laporan Konsultasi Publik - Konsepsi Peraturan Pemerintah - Naskah Akademik - Rancangan Peraturan - Laporan Kegiatan Pembinaan - Laporan Evaluasi Pembinaan 					
3	PENGANGKUTAN BAHAN NUKLIR					
	Naskah yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan dan pembinaan rancangan peraturan perundang-undangan					
	Penyusunan dan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan terkait Ketenaganukliran) dalam bidang Pengangkutan Bahan Nuklir <ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan/Jadwal Rapat - Notulen Rapat - Surat Keputusan - Laporan Konsultasi Publik 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DP2FRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Konsepsi Peraturan Pemerintah - Naskah Akademik - Rancangan Peraturan Perundang- undangan - Laporan Kegiatan Pembinaan - Laporan Evaluasi Pembinaan 					
4	LIMBAH NUKLIR					
	Naskah yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan dan pembinaan rancangan peraturan perundang-undangan					
	Penyusunan dan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Badan terkait Ketenaganukliran) dalam bidang Limbah Nuklir <ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan/Jadwal Rapat - Notulen Rapat - Surat Keputusan - Laporan Konsultasi Publik - Konsepsi Peraturan Pemerintah - Naskah Akademik - Rancangan Peraturan Perundang-undangan 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DP2FRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kegiatan Pembinaan - Laporan Evaluasi Pembinaan 					
III	PERIZINAN					
1	INSTALASI NUKLIR (REAKTOR)					
	a. Persetujuan evaluasi tapak <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan evaluasi tapak - Program evaluasi tapak - Sistem manajemen evaluasi tapak - Ktun persetujuan evaluasi tapak - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi - Laporan evaluasi keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat)/eksternal (BPK/BPKP), dan penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	b. Persetujuan desain <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan desain - Desain rinci reaktor nuklir - Laporan analisis keselamatan - KTUN Persetujuan desain - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat)/eksternal (BPK/BPKP), dan penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Persetujuan perubahan desain <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan perubahan desain - Data perubahan desain Reaktor Nuklir - Laporan analisis keselamatan - KTUN persetujuan perubahan desain - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Persetujuan modifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan modifikasi - Program modifikasi - Sistem manajemen modifikasi - KTUN persetujuan modifikasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Persetujuan utilisasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan utilisasi - Program utilisasi - Sistem manajemen utilisasi - KTUN persetujuan utilisasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	f. Persetujuan pernyataan pembebasan <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan pernyataan pembebasan - Hasil pelaksanaan Dekomisioning - Hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - Hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar Tapak - KTUN persetujuan pernyataan pembebasan - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	g. Izin tapak <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin tapak - Bukti pendirian badan hukum - Bukti hak atas tanah dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan - Kesesuaian dengan penataan ruang - Bukti pembayaran biaya permohonan izin - Laporan pelaksanaan evaluasi tapak - Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak - Daftar informasi desain tahap tapak - Data utama reaktor nuklir - Ktun izin tapak - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	h. Izin konstruksi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin konstruksi - Bukti pendirian badan hukum - Izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan - Izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti pembayaran izin konstruksi - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Sistem manajemen konstruksi - Daftar informasi desain tahap konstruksi - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Sistem safeguards - Rencana proteksi fisik - Program manajemen penuaan - Program dekomisioning 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Program konstruksi - Izin lingkungan - Laporan analisis keselamatan probabilistik - Deposito berjangka pada bank pemerintah 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional - Cadangan akuntansi - Ktun izin konstruksi - Laporan hasil evaluasi - Laporan evaluasi keselamatan 		(Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	i. Perpanjangan izin konstruksi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Konstruksi - Laporan kemajuan kegiatan Konstruksi - Program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi - KTUN perpanjangan izin konstruksi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Laporan Evaluasi Keselamatan		(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	j. Izin komisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin komisioning - Bukti pendirian badan hukum - Sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala daerah - Bukti bayar izin - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Program komisioning - Program perawatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat)/ eksternal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Sistem safeguards - Rencana proteksi fisik 		(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem manajemen - Program manajemen penuaan - Program dekomisioning - Program kesiapsiagaan nuklir - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - Laporan hasil kegiatan konstruksi - Gambar teknis reaktor nuklir terbangun - Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya - Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Ktun izin komisioning - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi - Laporan evaluasi keselamatan 		(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	k. Perpanjangan izin komisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Komisioning - Laporan kemajuan kegiatan Komisioning - Program dan jadwal baru kegiatan Komisioning - KTUN perpanjangan izin komisioning - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	1. Izin operasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin operasi - Bukti pendirian badan hukum - Izin usaha penyediaan tenaga listrik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dalam hal reaktor nuklir akan digunakan untuk pengusahaan tenaga listrik - Bukti biaya permohonan izin operasi - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Program perawatan - Sistem safeguards - Rencana proteksi fisik 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem manajemen - Program dekomisioning - Program kesiapsiagaan nuklir 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - KTUN izin operasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	m. Perpanjangan izin operasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Operasi - Laporan analisis keselamatan - Laporan penilaian keselamatan berkala - Laporan operasi - Laporan kajian penuaan - KTUN perpanjangan izin operasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	n. Izin dekomisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin dekomisioning - Bukti pendirian badan hukum - Bukti pembayaran biaya permohonan izin - Program dekomisioning - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Sistem manajemen - Ktun izin dekomisioning - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi - Laporan evaluasi keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	o. Perubahan izin <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perubahan izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir - Dokumen perubahan nama badan hukum Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir - Dokumen perubahan alamat reaktor nuklir - KTUN perubahan izin - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	INSTALASI NUKLIR (NON REAKTOR)					
	a. Fasilitas penyimpanan lestari bahan bakar nuklir bekas					
	1) Persetujuan evaluasi tapak <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan evaluasi tapak - Program evaluasi tapak - Sistem manajemen evaluasi tapak - KTUN persetujuan evaluasi tapak - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Persetujuan perubahan desain <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan perubahan desain - Laporan analisis keselamatan - KTUN persetujuan perubahan desain - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Persetujuan modifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan modifikasi - Program modifikasi - Sistem manajemen modifikasi - KTUN persetujuan modifikasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4) Persetujuan utilisasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan utilisasi - Program utilisasi - Sistem manajemen utilisasi - KTUN persetujuan utilisasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5) Persetujuan pernyataan pembebasan <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan pernyataan pembebasan - Hasil pelaksanaan Dekomisioning - Hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - Hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar Tapak - KTUN persetujuan pernyataan pembebasan - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>6) Izin tapak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin tapak - Bukti pendirian badan hukum - Bukti hak atas tanah dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan - Kesesuaian dengan penataan ruang - Bukti pembayaran biaya permohonan izin - Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; - Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; - Daftar informasi desain tahap tapak - Data utama reaktor nuklir. - Ktun izin tapak - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi),</p> <p>Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III),</p> <p>Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Laporan evaluasi keselamatan					
	7) Izin konstruksi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin konstruksi - Bukti pendirian badan hukum - Izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum - Sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan - Izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum</p> <ul style="list-style-type: none">- Izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal- Bukti pembayaran izin konstruksi- Laporan analisis keselamatan- Batasan dan kondisi operasi- Sistem manajemen konstruksi- Daftar informasi desain tahap konstruksi- Pro-am proteksi dan keselamatan radiasi- Sistem safeguards					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Deposito berjangka pada bank pemerintah - Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; - Cadangan akuntansi - KTUN izin konstruksi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	8) Perpanjangan izin konstruksi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Konstruksi - Laporan kemajuan kegiatan Konstruksi - Program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi - KTUN perpanjangan izin konstruksi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat)/eksternal (BPK/BPKP), dan penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	9) Izin komisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin komisioning - Bukti pendirian badan hukum - Sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala daerah - Bukti bayar izin - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Program komisioning - Program perawatan - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Sistem safeguards - Rencana proteksi fisik - Sistem manajemen - Program manajemen penuaan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Program dekomisioning - Program kesiapsiagaan nuklir - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - Laporan hasil kegiatan konstruksi - Gambar teknis reaktor nuklir terbangun - Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya; - Bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning - Ktun izin komisioning - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi - Laporan evaluasi keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	10) Perpanjangan izin komisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Komisioning - Laporan kemajuan kegiatan Komisioning - Program dan jadwal baru kegiatan Komisioning - KTUN perpanjangan izin komisioning - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	11) Izin operasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin operasi - Bukti pendirian badan hukum - Izin usaha penyediaan tenaga listrik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dalam hal reaktor nuklir akan digunakan untuk pengusahaan tenaga listrik - Bukti biaya permohonan izin operasi - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Program perawatan - Sistem safeguards 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Rencana proteksi fisik - Sistem manajemen - Program Dekomisioning - Program kesiapsiagaan nuklir - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - KTUN izin operasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi),</p> <p>Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	12) Perpanjangan izin operasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Operasi - Laporan analisis keselamatan - Laporan penilaian keselamatan berkala - Laporan operasi; - KTUN perpanjangan izin operasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	13) Izin dekomisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin dekomisioning - Bukti pendirian badan hukum - Bukti pembayaran biaya permohonan izin - Program dekomisioning - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Program kesiapsiagaan nuklir - Sistem manajemen - Ktun izin dekomisioning - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi - Laporan evaluasi keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	14) Perubahan izin <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perubahan izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir - Dokumen perubahan nama badan hukum Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir - Dokumen perubahan alamat reaktor nuklir - KTUN perubahan izin - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan - 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Fasilitas yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, termasuk instalasi radiometalurgi					
	1) Persetujuan evaluasi tapak <ul style="list-style-type: none"> - Persetujuan evaluasi tapak - Permohonan persetujuan evaluasi tapak - Program evaluasi tapak - Sistem manajemen evaluasi tapak - KTUN persetujuan evaluasi tapak - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Persetujuan perubahan desain <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan perubahan desain - Data perubahan desain Reaktor Nuklir - Laporan analisis keselamatan - KTUN persetujuan perubahan desain - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Persetujuan modifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan modifikasi - Program modifikasi - Sistem manajemen modifikasi - KTUN persetujuan modifikasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4) Persetujuan utilisasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan utilisasi - Program utilisasi - Sistem manajemen utilisasi - KTUN persetujuan utilisasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5) Persetujuan pernyataan pembebasan <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan pernyataan pembebasan - Hasil pelaksanaan Dekomisioning - Hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - Hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar Tapak - KTUN persetujuan pernyataan pembebasan - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>6) Izin tapak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin tapak - Bukti pendirian badan hukum - Bukti hak atas tanah dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan - Kesesuaian dengan penataan ruang - Bukti pembayaran biaya permohonan izin - Laporan pelaksanaan evaluasi tapak; - Laporan pelaksanaan sistem manajemen evaluasi tapak; - Daftar informasi desain tahap tapak - Data utama reaktor nuklir. - Ktun izin tapak - Laporan hasil evaluasi - Laporan hasil verifikasi 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi),</p> <p>Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III),</p> <p>Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Laporan evaluasi keselamatan					
	7) Izin konstruksi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin konstruksi - Bukti pendirian badan hukum - Izin mendirikan bangunan gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; - Sertifikat penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan - Izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal - Bukti pembayaran izin konstruksi - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Sistem manajemen konstruksi - Daftar informasi desain tahap konstruksi - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Sistem safeguards - Rencana proteksi fisik - Program manajemen penuaan - Program dekomisioning 					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Program kesiapsiagaan nuklir - Program Konstruksi - Izin Lingkungan - Laporan Analisis Keselamatan Probabilistik - Deposito berjangka pada bank pemerintah - Surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional - Cadangan akuntansi - KTUN izin konstruksi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi),</p> <p>Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	8) Perpanjangan izin konstruksi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Konstruksi - Laporan kemajuan kegiatan Konstruksi - Program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi - KTUN perpanjangan izin konstruksi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	9) Izin komisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin Komisioning - Bukti pendirian badan hukum - Sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala daerah - Bukti bayar izin - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Program Komisioning - Program perawatan - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Sistem Safeguards - Rencana proteksi fisik - Sistem manajemen - Program manajemen penuaan - Program Dekomisioning - Program kesiapsiagaan nuklir 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - Laporan hasil kegiatan Konstruksi 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Gambar teknis Reaktor Nuklir terbangun - Bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya; - Bukti jaminan finansial pelaksanaan Dekomisioning - KTUN izin komisioning - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	10) Perpanjangan izin komisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Komisioning - Laporan kemajuan kegiatan Komisioning - KTUN perpanjangan izin komisioning 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>11) Izin Operasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin Operasi - bukti pendirian badan hukum - izin usaha penyediaan tenaga listrik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dalam hal Reaktor Nuklir akan digunakan untuk pengusahaan tenaga listrik - Bukti biaya permohonan izin operasi - Laporan analisis keselamatan - Batasan dan kondisi operasi - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Program perawatan - Sistem Safeguards - Rencana proteksi fisik - Sistem manajemen 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi),</p> <p>Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Program Dekomisioning - Program kesiapsiagaan nuklir - Laporan pelaksanaan izin lingkungan - KTUN izin operasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 					
	12) Perpanjangan izin operasi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perpanjangan izin Operasi - Laporan analisis keselamatan - Laporan penilaian keselamatan berkala - Laporan operasi; - KTUN perpanjangan izin operasi - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Laporan Evaluasi Keselamatan		eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	13) Izin Dekomisioning <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan izin Dekomisioning - bukti pendirian badan hukum - bukti pembayaran biaya permohonan izin - Program Dekomisioning - Program proteksi dan keselamatan radiasi; - Program kesiapsiagaan nuklir; - Sistem manajemen - KTUN izin dekomisioning - Laporan Hasil Evaluasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 		penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	14) Perubahan izin <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perubahan izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir - Dokumen perubahan nama badan hukum memegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor nuklir - Dokumen perubahan alamat reaktor nuklir - KTUN perubahan izin - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Evaluasi Keselamatan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	ZAT RADIOAKTIF DAN RADIASI					
	a. Penelitian dan Industri					
	1) Evaluasi dokumen permohonan izin fasilitas penelitian dan industri <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur penilaian dokumen persyaratan izin - Instruksi kerja penilaian dokumen administrasi persyaratan izin - Instruksi kerja penilaian dokumen teknis persyaratan izin - Dokumen penetapan tingkat layanan/<i>service level arrangement</i> (SLA) proses penilaian permohonan izin - Laporan hasil evaluasi/penilaian permohonan izin - Laporan hasil verifikasi lapangan terkait proses perizinan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pembinaan dan bimbingan teknis proses perizinan - Arsip surat penugasan/kedinasan terkait perizinan - Petunjuk dan revisi petunjuk pelaksanaan (juklak/juknis) - Data fasilitas perizinan penelitian dan industri 					
	2) Penerbitan KTUN Perizinan bidang Industri <ul style="list-style-type: none"> - Arsip KTUN Izin Pemanfaatan dan Persetujuan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
b. Kesehatan						
	1) Evaluasi dokumen permohonan izin fasilitas kesehatan - Prosedur penilaian dokumen persyaratan izin - Instruksi kerja penilaian dokumen administrasi persyaratan izin - Instruksi kerja penilaian dokumen teknis persyaratan izin - Dokumen Penetapan Tingkat Layanan/Service Level Arrangement	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(SLA) proses penilaian permohonan izin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Permohonan izin - Laporan Hasil Verifikasi Lapangan terkait Proses Perizinan - Laporan Pelaksanaan <i>On the Spot Licensing</i> (OTSL) bidang Kesehatan 		<p>(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pembinaan dan Bimbingan Teknis Proses Perizinan - Arsip Surat Penugasan/Kedinasan terkait Perizinan - Data perizinan bidang kesehatan 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) /</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2) Penerbitan KTUN Perizinan bidang Kesehatan - Arsip KTUN Izin Pemanfaatan dan Persetujuan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	c. Pengujian dan Prosedur Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan standar pengujian Petugas Proteksi Radiasi bidang industri dan medik - Laporan Pelaksanaan Pengujian petugas proteksi radiasi (soal dan jawaban ujian lisensi Petugas Proteksi Radiasi, bahan rapat Tim Penguji, hasil ujian) - Laporan Pelaksanaan Penyegaran Petugas Proteksi Radiasi (PPR) - Data Penerbitan Surat Izin Bekerja (SIB) PPR - Data Petugas ber-SIB 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
4	BAHAN NUKLIR					
	a. Izin baru/perpanjangan Pemanfaatan Bahan Nuklir (IPBN) <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan litbang - Permohonan IPBN - Bukti pendirian badan hukum; - Bukti pembayaran biaya IPBN - KTUN mengenai izin Konstruksi, Komisioning, operasi, atau Dekomisioning Instalasi Nuklir. - Dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir - Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir - Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Rencana proteksi fisik - Sistem Safeguards - KTUN IPBN 		Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	b. Pemanfaatan: pembuatan dan produksi <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan IPBN - Bukti pendirian badan hukum - Bukti pembayaran biaya IPBN - KTUN mengenai izin Konstruksi, Komisioning, operasi, atau Dekomisioning Instalasi Nuklir. - Dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir - Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi - Pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Rencana proteksi fisik - Sistem Safeguards - KTUN IPBN 		eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	c. Pemanfaatan: penyimpanan dan penggunaan <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan IPBN - Bukti pendirian badan hukum; - Bukti pembayaran biaya IPBN 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan KTUN mengenai izin Konstruksi, Komisioning, operasi, atau Dekomisioning Instalasi Nuklir. - Dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir - Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir - Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi - Pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Rencana proteksi fisik - Sistem Safeguards - KTUN IPBN 		<p>Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>			

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Pemanfaatan: pengalihan, ekspor, dan impor <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan IPBN - Bukti pendirian badan hukum; - Bukti pembayaran biaya IPBN - Angka pengenal impor atau izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan atau dokumen notifikasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk Pemohon yang merupakan instansi pemerintah - Izin ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan KTUN mengenai izin Konstruksi, Komisioning, operasi, atau Dekomisioning Instalasi Nuklir. - dokumen spesifikasi teknis Bahan Nuklir - Prosedur yang terkait dengan pemanfaatan Bahan Nuklir - Sertifikat kalibrasi alat ukur proteksi radiasi 					
	<ul style="list-style-type: none"> - Pernyataan perencanaan penanganan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan limbah radioaktif - Program proteksi dan keselamatan radiasi - Rencana proteksi fisik - Sistem Safeguards - KTUN IPBN 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	e. Perubahan IPBN <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan perubahan IPBN - Dokumen perubahan nama badan hukum Pemegang Izin; atau alamat Instalasi Nuklir; atau nama pekerja D654 petugas proteksi radiasi, pengurus inventori Bahan Nuklir, pengawas inventori Bahan Nuklir, atau petugas proteksi fisik; atau kuantitas Bahan Nuklir. 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti biaya izin perubahan IPBN - KTUN perubahan izin 		(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	f. Persetujuan impor <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan impor - Konosemen (<i>air way bill/ bill of lading</i>) - <i>commercial invoice</i> - Daftar pengepakan (<i>packing list</i>) - <i>shippers declaration of dangerous goods/multi modal declaration of dangerous goods</i> - pemberitahuan impor barang - Bukti bayar persetujuan impor - KTUN persetujuan impor 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	g. Persetujuan ekspor <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan ekspor - <i>Commercial invoice</i> - Daftar pengepakan (<i>packing list</i>) - Pemberitahuan ekspor barang - Bukti bayar persetujuan ekspor - KTUN persetujuan ekspor 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
5	PENGANGKUTAN BAHAN NUKLIR					
	a. Persetujuan pengiriman <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan pengiriman - Rencana proteksi fisik - Rencana kontijensi - Peta dan rute pengangkutan - Bukti kelayakan kendaraan - Program proteksi radiasi selama pengangkutan - Prosedur penanggulangan kedaruratan - KTUN persetujuan pengiriman 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	b. Persetujuan pengiriman kembali bahan bakar nuklir bekas <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan persetujuan pengiriman kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas - Dokumen spesifikasi teknis Bahan Bakar Nuklir Bekas yang akan dikirim kembali - Informasi mengenai identitas penerima di negara asal dan pengirim; dan pengangkut dan moda angkutan dari pelabuhan muat ke pelabuhan bongkar di negara asal - sistem proteksi fisik Bahan Nuklir - sistem <i>Safeguards</i>, meliputi dokumen perubahan inventori - pemindahan Bahan Nuklir (<i>inventory change document</i> - material transfer); dan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - laporan perubahan inventori (<i>inventory change report</i>). - Bukti bayar persetujuan pengiriman kembali BBNB - KTUN persetujuan pengiriman bahan bakar nuklir bekas 					
6	SERTIFIKASI					
	a. Sertifikasi personil izin bekerja petugas instalasi dan bahan nuklir					
	1) Dokumen permohonan izin bekerja <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan izin bekerja - Formulir permohonan izin bekerja petugas IBN yang telah diisi - Salinan bukti identitas diri Petugas IBN - Salinan surat hasil pemeriksaan kesehatan umum - Salinan sertifikat lulus Pelatihan berdasarkan Kompetensi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja - Salinan ijazah terakhir - Salinan surat pernyataan telah melakukan magang ditandatangani pemegang izin - Salinan surat pernyataan telah melakukan bekerja ditandatangani pemegang izin 		eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2) Dokumen penyelenggaraan Ujian Sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Surat tugas penyusun soal, pengawas, dan penguji, dari Kepala BAPETEN - Daftar hadir peserta ujian - Daftar hadir pengawas dan penguji - Soal ujian petugas instalasi dan bahan nuklir 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Berita acara pengujian petugas instalasi dan bahan nuklir - Daftar nilai ujian tulis dan lisan - Laporan penyelenggaraan ujian 		(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
b. Dokumen penerbitan surat izin bekerja						
	1) Dokumen penerbitan surat izin bekerja baru <ul style="list-style-type: none"> - Salinan pernyataan lulus ujian kualifikasi/rekualifikasi - Laporan Hasil Evaluasi - KTUN izin bekerja 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2) Dokumen perpanjangan izin bekerja <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan izin bekerja - Formulir permohonan izin bekerja petugas IBN yang telah diisi - Salinan surat hasil pemeriksaan kesehatan umum - Salinan sertifikat lulus pelatihan penyegaran - Salinan bukti pembayaran biaya permohonan Izin Bekerja - Surat keterangan lulus ujian rekualifikasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
c. Sertifikasi dan Validasi Bungkus						
	1) Persetujuan desain zat radioaktif <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Sertifikat lolos uji atau Laporan Hasil Uji - Sertifikat desain zat radioaktif - Deskripsi zat radioaktif - Manual mutu proses pembuatan zat radioaktif - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Hasil Evaluasi - Sertifikat Persetujuan desain zat radioaktif/KTUN 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2) Persetujuan desain bungkusan <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Sertifikat lolos uji atau Laporan Hasil Uji - Sertifikat desain bungkusan - Deskripsi zat radioaktif - Manual mutu proses pembuatan zat radioaktif - Laporan Hasil Verifikasi - Laporan Hasil Evaluasi - Sertifikat Persetujuan desain zat radioaktif/KTUN 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	3) Validasi sertifikat <ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Sertifikat atau salinan sertifikat persetujuan dari negara asal - Deskripsi Zat Radioaktif atau Bungkusan - Laporan Hasil Evaluasi - Validasi Sertifikat/KTUN 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4) Persetujuan kelayakan kamera radiografi <ul style="list-style-type: none"> - Surat permohonan - Sertifikat lolos uji atau Laporan Hasil Uji - Laporan Hasil Evaluasi - Laporan Hasil Verifikasi - Sertifikat atau KTUN 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Penerbitan Sertifikat Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penerbitan Sertifikasi Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X - Instruksi Kerja Sertifikasi Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X - Laporan Hasil Uji (LHU) - Rekaman Kendali LHU - Rekaman hasil pemeriksaan kelengkapan - Laporan hasil pemeriksaan kelengkapan - Logbook tanda terima LHU - Logbook penerimaan LHU ke TA/LEHU kembali dari TA/hasil pemeriksaan kelengkapan - Logbook piket - Laporan Evaluasi Hasil Uji (LEHU) - Sertifikasi/Notisi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Rekaman seluruh tahapan LHU diterima s.d LEHU terbit (e-doc) 					
	<p>e. Penunjukan Laboratorium Penguji/Penyedia Jasa Teknis Ketenaganukliran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penunjukan Laboratorium Penguji/Penyedia Jasa Teknis Ketenaganukliran - Instruksi Kerja Penunjukan Laboratorium Penguji/Penyedia Jasa Teknis Ketenaganukliran - Laporan Evaluasi - Laporan verifikasi lapangan - Salinan KTUN Penetapan/Penunjukan - Laporan surveilan - Laporan kinerja tahunan Penguji - Arsip surat kedinasan - Salinan Surat Perintah/Pakta Integritas 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi),</p> <p>Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Rekaman seluruh tahapan penetapan/penunjukan - penguji/laboratorium (e-doc) 					
	f. Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran - Instruksi Kerja Penunjukan Penunjukan Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran - Laporan Evaluasi - Laporan verifikasi lapangan - Salinan KTUN Penetapan/Penunjukan - Laporan surveilan - Laporan kinerja tahunan Penguji - Arsip surat kedinasan - Salinan Surat Perintah/Pakta Integritas 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	- Rekaman seluruh tahapan penetapan/penunjukan lembaga pelatihan (e-doc)		Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	g. Penunjukan Lembaga Sertifikasi <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Penunjukan Lembaga Sertifikasi - Instruksi Kerja Penunjukan Lembaga Sertifikasi - Laporan Evaluasi - Laporan verifikasi lapangan - Salinan KTUN Penetapan/Penunjukan - Laporan surveilan - Arsip surat kedinasan Rekaman Seluruh tahapan penetapan/penunjukan lembaga sertifikasi (e-doc) 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	h. Sertifikasi Tenaga Ahli <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Sertifikasi tenaga ahli - Instruksi Kerja Sertifikasi tenaga ahli - Soal uji sertifikasi tenaga ahli - Hasil Uji sertifikasi tenaga ahli - Bahan ajar sertifikasi tenaga ahli - Arsip surat kedinasan - Rekaman seluruh tahapan sertifikasi person (e-doc) 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>i. Uji Profisiensi</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur Uji Profisiensi- Instruksi Kerja Uji Profisiensi- Protokol Uji Profisiensi- Lembar kerja uji profisiensi- Hasil Uji Profisiensi (peserta)- Hasil uji stabilitas dan penentuan nilai acuan (penyelenggara)- Jadwal uji profisiensi- Arsip surat kedinasan- Rekaman seluruh tahapan uji profisiensi (e-doc)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
7	REEKSPOR ZAT RADIASI/SUMBER RADIASI LAINNYA					
	<ul style="list-style-type: none">- Data teknis sumber radioaktif yang akan direekspor- Data pelaksanaan pengangkutan terkait reekspor	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
8	KETEKNIKAN					
	a. Pengelolaan Alat Ukur Radiasi <ul style="list-style-type: none">- Manual/Instruksi Kerja Pengoperasian Peralatan- Rekaman peminjaman/pengembalian Alat Ukur Radiasi- Sertifikat kalibrasi/ dokumen kalibrasi untuk alat yang dikalibrasi internal- Arsip dokumen kalibrasi- Logbook perawatan alat- Logbook kondisi ruangan penyimpanan alat- Data teknis Alat Ukur Radiasi- Dokumen/Rekaman Data Hibah/Pengadaan Alat Ukur Radiasi- Rekaman Surat Dinas Peminjaman Alat Ukur Radiasi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>b. Laboratorium Keteknikan (Lingkungan, <i>Safeguard, Security</i>)</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen Akreditasi Laboratorium Pengujian- Prosedur laboratorium lingkungan, <i>safeguard</i> dan <i>security</i>- Instruksi kerja laboratorium lingkungan, <i>safeguard</i> dan <i>security</i>- Logbook kondisi ruangan laboratorium- Sertifikat kalibrasi/ dokumen kalibrasi untuk alat yang dikalibrasi internal- Rekaman Surat Dinas Permohonan Uji Sampel- Dokumen Pengelolaan/ pengujian sampel- Laporan Hasil Uji Sampel	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>c. Implementasi Keamanan Nuklir Nasional</p> <ul style="list-style-type: none">- Laporan Bimbingan Teknis Keamanan Nuklir- Laporan Koordinasi terkait Keamanan Nuklir Nasional- Laporan Hasil Pemantauan/Verifikasi/Implementasi Keamanan Nuklir- Informasi/Laporan Keamanan Nuklir dari instansi terkait	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
IV	REVIEW DAN PENILAIAN KESELAMATAN NUKLIR					
1	KESELAMATAN REAKTOR					
	a. Standar Keselamatan Instalasi Nuklir Pelaksanaan pengkajian keselamatan INSTALASI NUKLIR					
	1) Pelaksanaan Pengkajian <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat dengan stakeholder- Notulen pembahasan kegiatan- KAK survey lapangan- Data teknis primer/sekunder- Laporan survey lapangan- Laporan hasil kajian	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2) Penyusunan Pedoman Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan draft kajian Teknis - KAK survey lapangan - Laporan survey lapangan - Pedoman teknis 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	b. Standar Keselamatan Reaktor					
	1) Pelaksanaan pengkajian keselamatan reaktor <ul style="list-style-type: none">- Pengkajian simulasi reaktor.- Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja- Surat Teguran keterlambatan penyampaian Laporan operasi instalasi reaktor nuklir- Laporan operasi instalasi reaktor nuklir- Laporan hasil evaluasi (LHE) operasi instalasi reaktor nuklir- Notulen	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2) Evaluasi pengkajian standar keselamatan dalam disain dan operasi, penerapan budaya keselamatan, pengumpulan data kecelakaan nuklir dan non nuklir <ul style="list-style-type: none">- Permintaan evaluasi- pelaksanaan evaluasi- Laporan evaluasi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Keselamatan Deterministik					
	Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan pengkajian dan analisis keselamatan deterministik antara lain:					
	1) Pelaksanaan Pengkajian <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat dengan stakeholder- Notulen pembahasan kegiatan- KAK survey lapangan- Data teknis primer/sekunder- Laporan survey lapangan- Laporan hasil kajian	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Penyusunan Pedoman Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan draft pedoman - KAK survey lapangan - Laporan survey lapangan - Pedoman Teknis 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
d. Keselamatan Probabilistik						
Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan pengkajian dan analisis keselamatan probabilistikstik antara lain:						
	1) Pelaksanaan Pengkajian <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat dengan stakeholder- Notulen pembahasan kegiatan- KAK survey lapangan- Data teknis primer/sekunder- Laporan survey lapangan- Laporan hasil kajian	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Penyusunan Pedoman Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan draft pedoman - KAK survey lapangan - Laporan survey lapangan - Pedoman teknis 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Keselamatan Radiasi, Personil dan Lingkungan					
	Berkas yang berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan pengkajian dan analisis keselamatan lingkungan antara lain:					
	1) Pelaksanaan Pengkajian <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat dengan stakeholder- Notulen pembahasan kegiatan- KAK survey lapangan- Data teknis primer/sekunder- Laporan survey lapangan- Laporan hasil kajian	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Penyusunan Pedoman Teknis <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat dengan stakeholder- Notulen pembahasan draft pedoman- KAK survey lapangan- Laporan survey lapangan- Pedoman teknis	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>f. <i>Safeguard dan Security</i></p> <p>1) Pelaksanaan Pengkajian</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat dengan stakeholder- Notulen pembahasan kegiatan- KAK survey lapangan- Data teknis primer/sekunder- Laporan survey lapangan- Laporan hasil kajian	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Penyusunan Pedoman Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat dengan stakeholder - Notulen pembahasan draft pedoman - KAK survey lapangan - Laporan survey lapangan - Draft Pedoman teknis 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>g. Pengelolaan dan Penggunaan Komputasi Penunjang Pengkajian</p> <p>1) Log book peminjaman alat ukur radiasi</p> <p>2) Dokumen perpanjangan lisensi software</p> <p>3) Laporan hasil analisis dengan komputasi</p>	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
V	REVIEW KESELAMATAN RADIASI, PERSONIL DAN FASILITAS RADIASI					
1	KESELAMATAN RADIASI					
	a. Pelaksanaan Pengkajian <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat dengan stakeholder- Notulen pembahasan kegiatan- KAK survey lapangan- Data teknis primer/sekunder- Laporan hasil kajian	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Penyusunan Pedoman Teknis <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat dengan stakeholder- Notulen pembahasan draft pedoman- KAK survey lapangan- Laporan survey lapangan- Draft Pedoman teknis	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>c. Pembinaan/Pertemuan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan- KAK pembinaan/pertemuan teknis- Notulen pembahasan program pembinaan- Hasil evaluasi penyelenggaraan pembinaan- Laporan penyelenggaraan pembinaan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Pengelolaan dan Penggunaan Peralatan Penunjang Pengkajian <ul style="list-style-type: none"> - Log book peminjaman alat - Sertifikat kalibrasi - Hasil perawatan alat - Hasil cek antara - Surat menyurat terkait pengelolaan dan penggunaan alat 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Telaah dan Kajian Dokumen Permohonan Perijinan, Dokumen Peraturan & Dokumen Inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>f. Pelaksanaan Keselamatan Radiasi</p> <p>Pelaksanaan pengkajian keselamatan radiasi</p> <p>1) Analisis dan evaluasi keselamatan radiasi.</p> <p>2) Baku Tingkat Radioaktivitas di Lingkungan</p> <p>3) Laporan Pengelolaan Limbah Radioaktif</p>	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	1. P2STPFRZ R 2. DPIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	KESELAMATAN PERSONIL					
	Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pengkajian/analisis, penyusunan pedoman teknis dan pembinaan teknis terkait keselamatan pekerja radiasi, pasien, dan masyarakat antara lain:					
	a. Pelaksanaan Pengkajian <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat dengan stakeholder- Notulen pembahasan kegiatan- KAK survey lapangan- Data teknis primer/sekunder- Laporan survey lapangan- Laporan hasil kajian	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	b. Penyusunan Pedoman Teknis <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat dengan stakeholder- Notulen pembahasan draft pedoman- KAK survey lapangan- Laporan survey lapangan- Draft Pedoman teknis	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Pembinaan/Pertemuan Teknis <ul style="list-style-type: none"> - Surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan - KAK pembinaan/pertemuan teknis - Notulen pembahasan program pembinaan - Hasil evaluasi penyelenggaraan pembinaan - Laporan penyelenggaraan pembinaan 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Pengelolaan dan Penggunaan Peralatan Penunjang Pengkajian <ul style="list-style-type: none"> - Log book peminjaman alat - Sertifikat kalibrasi - Hasil perawatan alat - Hasil cek antara - Surat menyurat terkait pengelolaan dan penggunaan alat 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Pelaksanaan Keselamatan Personil / Proteksi Radiasi Keselamatan Radiasi <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Surat Tindak Lanjut Evaluasi Dosis - Surat Pemanggilan Dosis Berlebih - Surat Teguran keterlambatan penyampaian Laporan Pemantauan Dosis Pekerja Radiasi - Laporan Hasil Uji Pemantauan Dosis Pekerja Radiasi - LHE Pemantauan Dosis Pekerja Radiasi - Laporan Kajian Penyebab Terjadinya Kejadian (KPK) - Laporan hasil pemanggilan Dosis Berlebih - Laporan Hasil Evaluasi (LHE) KPK - Notulen Rapat Pemantauan Dosis Pekerja Radiasi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	KESELAMATAN FASILITAS RADIASI					
	Naskah yang berkenaan dengan kegiatan pengkajian/analisis, penyusunan pedoman teknis dan pembinaan teknis terkait keselamatan fasilitas radiasi, antara lain:					
	a. Pelaksanaan Pengkajian <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat dengan stakeholder- Notulen pembahasan kegiatan- KAK survey lapangan- Data teknis primer/sekunder- Laporan survey lapangan- Laporan hasil kajian	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	b. Penyusunan Pedoman Teknis <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat dengan stakeholder- Notulen pembahasan draft pedoman- KAK survey lapangan- Laporan survey lapangan- Draft Pedoman teknis- Pedoman teknis	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR
	c. Pembinaan/Pertemuan Teknis <ul style="list-style-type: none">- Surat menyurat terkait pelaksanaan kegiatan- KAK pembinaan/pertemuan teknis- Notulen pembahasan program pembinaan- Hasil evaluasi penyelenggaraan pembinaan- Laporan penyelenggaraan pembinaan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	d. Pengelolaan dan Penggunaan Peralatan Penunjang Pengkajian <ul style="list-style-type: none">- Log book peminjaman alat- Sertifikat kalibrasi- Hasil perawatan alat- Hasil cek antara alat ukur- Surat menyurat terkait pengelolaan dan penggunaan alat	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
4	KESELAMATAN LINGKUNGAN					
	Berkas yang berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan pengkajian dan analisis keselamatan lingkungan antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Hasil pemantauan RDMS (<i>Real Data Monitor System</i>) dalam bentuk soft file- Hasil pemantauan RDMS (<i>Real Data Monitor System</i>) dalam bentuk hard file	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	P2STPFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VI	INSPEKSI					
1	INSTALASI NUKLIR (REAKTOR)					
	Naskah yang berkenaan dengan kegiatan inspeksi pada Reaktor Nuklir antara lain:					
	a. Inspeksi Keselamatan reaktor nuklir					
	1) Perencanaan inspeksi keselamatan reaktor nuklir - Jadwal Inspeksi - Surat izin personel - Surat perintah inspeksi (SPI) - Surat pemberitahuan inspeksi (SBI) - Surat peminjaman alat - Notulen pra inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2) Proses kegiatan inspeksi keselamatan reaktor nuklir - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Form Isian Hasil Inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	3) Laporan hasil inspeksi reaktor nuklir <ul style="list-style-type: none">- Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI)- Laporan Hasil Inspeksi (LHI)- Laporan Eksekutif (LARE)/Memo Hasil Inspeksi- Notulen pasca inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Inspeksi Safeguard					
	1) Perencanaan kegiatan Inspeksi Safeguards pada reaktor nuklir - Jadwal Inspeksi - Surat izin personel - Surat perintah inspeksi (SPI) - Surat pemberitahuan inspeksi (SBI) - Surat peminjaman alat - Notulen pra inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Proses Kegiatan Inspeksi bahan nuklir dan protokol tambahan pada reaktor nuklir - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Form Isian Hasil Inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>3) Pelaporan kegiatan inspeksi bahan nuklir</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI)- Laporan Hasil Inspeksi (LHI)- Notulen pasca inspeksi- Laporan bahan Nuklir Ke IAEA- Dokumen Daftar Informasi Desain (DIQ) Fasilitas- Deklarasi Protokol Tambahan Ke IAEA	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Inspeksi Proteksi Fisik					
	1) Perencanaan Kegiatan Inspeksi Proteksi Fisik pada reaktor nuklir - Jadwal Inspeksi - Surat izin personel - Surat perintah inspeksi (SPI) - Surat pemberitahuan inspeksi (SBI) - Surat peminjaman alat - Notulen pra inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>2) Proses Kegiatan Inspeksi Proteksi Fisik pada reaktor nuklir</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Dokumen Ancaman Dasar Desain - Dokumen Rencana Proteksi Fisik Fasilitas - Form Isian Hasil Inspeksi - Dokumen Evaluasi Rencana Proteksi Fisik - Form Isian Hasil Inspeksi 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>3) Pelaporan kegiatan inspeksi proteksi fisik pada reaktor nuklir</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI)- Laporan Hasil Inspeksi (LHI) Proteksi Fisik- Notulen pasca inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	INSTALASI NUKLIR NON REAKTOR (INNR)					
	a. Inspeksi Keselamatan Instalasi nuklir non reaktor					
	1) Perencanaan inspeksi nuklir non reaktor <ul style="list-style-type: none">- Jadwal Inspeksi- Surat izin personel- Surat perintah inspeksi (SPI)- Surat pemberitahuan inspeksi (SBI)- Surat peminjaman alat- Notulen pra inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Proses kegiatan inspeksi nuklir non reaktor - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Form Isian Hasil Inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Laporan hasil inspeksi nuklir non reaktor <ul style="list-style-type: none">- Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI)- Laporan Hasil Inspeksi (LHI)- Laporan Eksekutif (LARE)/Memo Hasil Inspeksi- Notulen pasca inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Inspeksi Safeguard					
	1) Perencanaan kegiatan Inspeksi Safeguards pada Instalsi Nuklir Non Reaktor - Jadwal Inspeksi - Surat izin personel - Surat perintah inspeksi (SPI) - Surat pemberitahuan inspeksi (SBI) - Surat peminjaman alat - Notulen pra inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Proses Kegiatan Inspeksi bahan nuklir dan protokol tambahan pada Instalsi Nuklir Non Reaktor - Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja - Form Isian Hasil Inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Pelaporan kegiatan inspeksi bahan nuklir pada Instansi Nuklir Non Reaktor - Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI) - Laporan Hasil Inspeksi (LHI) - Notulen pasca inspeksi - Laporan bahan Nuklir Ke IAEA - Dokumen Daftar Informasi Desain (DIQ) Fasilitas - Deklarasi Protokol Tambahan Ke IAEA	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
c. Inspeksi Proteksi Fisik						
	1) Perencanaan Kegiatan Inspeksi Proteksi Fisik pada Instalasi Nuklir Non Reaktor <ul style="list-style-type: none">- Jadwal Inspeksi- Surat izin personel- Surat perintah inspeksi (SPI)- Surat pemberitahuan inspeksi (SBI)- Surat peminjaman alat- Notulen pra inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>2) Proses Kegiatan Inspeksi Proteksi Fisik pada Instalasi Nuklir Non Reaktor</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja- Dokumen Ancaman Dasar Desain- Dokumen Rencana Proteksi Fisik Fasilitas- Dokumen Evaluasi Rencana Proteksi Fisik- Form Isian Hasil Inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>3) Pelaporan kegiatan inspeksi proteksi fisik pada Instansi Nuklir Non Reaktor</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI)- Laporan Hasil Inspeksi (LHI) Proteksi Fisik- Notulen pasca inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	d. Inspeksi Keselamatan Lingkungan					
	1) Perencanaan Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lingkungan - Jadwal Inspeksi - Surat izin personel - Surat perintah inspeksi (SPI) - Surat pemberitahuan inspeksi (SBI) - Surat peminjaman alat - Notulen pra inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>2) Proses Kegiatan Inspeksi Keselamatan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">- Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja- Surat Pemberitahuan Pemantauan Lingkungan/ TENORM/ Rona Awal- Surat Tugas Pemantauan Lingkungan/TENORM/ Rona Awal- Surat Teguran keterlambatan penyampaian Laporan Pemantauan Lingkungan- Laporan Pemantauan Lingkungan- LHE Laporan Pemantauan Lingkungan- Laporan Hasil Pemantauan (LHP) Lingkungan/TENORM/ Rona Awal- Surat Peminjaman alat pemantauan Lingkungan/TENORM/ Rona Awal	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none">- Sertifikat hasil analisa sampel lingkungan/TENORM/ Rona Awal- Form Isian Hasil Inspeksi					
	<p>3) Pelaporan kegiatan inspeksi Keselamatan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi (SBHI)- Laporan Hasil Inspeksi Keselamatan Lingkungan- Notulen rapat kegiatan pemantauan lingkungan/TENORM/Rona Awal	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIIBN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	INSPEKSI FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF (IFRZR)					
	a. Penelitian dan Industri					
	1) Perencanaan Inspeksi fasilitas Penelitian dan Industri antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Surat Izin Inspektur- Surat Peminjaman Alat- Jadwal Inspeksi- Surat Pemberitahuan Inspeksi- Laporan Keselamatan Fasilitas- Notulen Pra Inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Proses Kegiatan Inspeksi fasilitas Penelitian dan Industri antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Form Isian Hasil Inspeksi- Surat Perintah Inspeksi- Surat Perintah Inspeksi- Surat Perintah Inspeksi- Surat Perintah Inspeksi- Surat Perintah Inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Pelaporan kegiatan Inspeksi antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Laporan Hasil Inspeksi- Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>4) Pembinaan fasilitas penelitian dan industri antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Notulen pembahasan program pembinaan - Hasil evaluasi penyelenggaraan pembinaan - Laporan penyelenggaraan pembinaan 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5) Penegakan hukum fasilitas penelitian dan industri antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Surat Teguran - Surat Peringatan 1 - Surat Peringatan 2 - Putusan Pengadilan - Rekomendasi Tim Gelar Perkara 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Kesehatan					
	1) Perencanaan Inspeksi fasilitas kesehatan antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Surat Izin Inspektur- Surat Peminjaman Alat- Jadwal Inspeksi- Surat Pemberitahuan Inspeksi- Laporan Keselamatan Fasilitas- Notulen Pra Inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Proses Kegiatan Inspeksi fasilitas kesehatan antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Form Isian Hasil Inspeksi- Surat Perintah Inspeksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Laporan Kegiatan Inspeksi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Inspeksi - Surat Pemberitahuan Hasil Inspeksi 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4) Pembinaan fasilitas kesehatan antara lain: <ul style="list-style-type: none">- Notulen pembahasan program pembinaan- Hasil evaluasi penyelenggaraan pembinaan- Laporan penyelenggaraan pembinaan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>5) Penegakan hukum fasilitas kesehatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Teguran - Surat Peringatan 1 - Surat Peringatan 2 - Putusan Pengadilan - Rekomendasi Tim Gelar Perkara 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Sistem Manajemen					
	<ul style="list-style-type: none">- Prosedur Perencanaan Inspeksi- Prosedur Pelaksanaan Inspeksi- Prosedur Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi- Prosedur Penegakan Hukum- Prosedur Penilaian Kinerja Fasilitas- Prosedur Evaluasi Penyelenggaraan Inspeksi- Prosedur Tata Kelola Inspektur	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Kerja pelaksanaan inspeksi pasca LKF - Instruksi Kerja pembuatan LHI melalui BALIS INFARA - Instruksi Kerja pembuatan LARE - Instruksi Kerja perencanaan inspeksi - Instruksi Kerja kegiatan inspeksi - Instruksi Kerja tindak lanjut hasil inspeksi - Instruksi kerja evaluasi pelaksanaan Inspeksi - Laporan Tahunan Kegiatan Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif 	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DIFRZR

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VII	KESIAPSIAGAAN NUKLIR					
1	GLADI KEDARURATAN					
	<ul style="list-style-type: none">- Arsip surat kedinasan terkait pelatihan- Laporan pelaksanaan kegiatan- Dokumen skenario latihan- Dokumen evaluasi latihan- Notulen hasil rapat pembahasan skenario, koordinasi latihan dan evaluasi- Rekaman berupa video dan soft file	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	KEGIATAN TANGGAP DARURAT					
	<ul style="list-style-type: none">- Prosedur, Pedoman dan Instruksi Kerja- Informasi/laporan kedaruratan dari masyarakat/pemegang ijin- Arsip surat kedinasan verifikasi kedaruratan- Rencana tanggap darurat- Laporan pelaksanaan tanggap darurat	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	PENGEMBANGAN SATUAN TANGGAP DARURAT (STD)					
	<ul style="list-style-type: none">- Logbook piket personil STD- Rekaman pemeriksaan kesehatan anggota STD- Laporan latihan penanggulangan kecelakaan- Dokumen pengembangan pelatihan satuan tanggap darurat	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
4	PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TANGGAP DARURAT					
	<ul style="list-style-type: none">- <i>Logbook</i> perawatan kondisi ruang komando- <i>Logbook</i> perawatan peralatan tanggap darurat- Sertifikat Kalibrasi peralatan tanggap darurat- Hasil pemantauan RDMS (<i>Real Data Monitor System</i>)/RPM (<i>soft file</i>)- Hasil pemantauan RDMS (<i>Real Data Monitor System</i>)/RPM (<i>hard file</i>)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi BAPETEN	DKKN

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
I. PERENCANAAN						
1	POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN					
	a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP) c. Rencana Strategis	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
2	PROGRAM KERJA TAHUNAN					
	a. Usulan Unit Kerja beserta data pendukung b. Usulan BAPETEN c. Program Kerja Tahunan Unit Kerja d. Program Kerja Tahunan BAPETEN	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	PENETAPAN/KONTRAK KERJA					
	a. Kepala BAPETEN b. Pimpinan Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
4	LAPORAN					
	a. Laporan Insidental	Terbatas	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
	b. Laporan Berkala 1) Laporan Bulanan Unit Kerja 2) Laporan Triwulanan Unit Kerja	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Program & Anggaran - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3) Laporan Semesteran Unit Kerja 4) Laporan Tahunan Unit Kerja 5) Laporan Tahunan BAPETEN				mengganggu kinerja BAPETEN	
	c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1) LAKIP Unit Kerja 2) LAKIP BAPETEN	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
5	EVALUASI PROGRAM					
	a. Evaluasi Program Unit Kerja b. Evaluasi Program BAPETEN	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
II. HUKUM						
1	Program Legislasi a. Bahan/materi program legislasi nasional dari BAPETEN b. Program legislasi BAPETEN	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan a. Rancangan Undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan b. Rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Rancangan Peraturan/Keputusan/ Instruksi Presiden, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan					
3	Peraturan Kepala BAPETEN (mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO
4	Keputusan/Ketetapan Pimpinan BAPETEN (rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum) a. Keputusan Kepala BAPETEN b. Keputusan Pejabat eselon I/II	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO
5	Instruksi/surat edaran (mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum) a. Instruksi/Surat Edaran Kepala BAPETEN	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Instruksi/Surat Edaran Pejabat Eselon I/II					
6	Surat Perintah a. Surat Perintah Kepala BAPETEN b. Surat Perintah pejabat setingkat Eselon I, II, III, IV	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Seluruh Bagian di Kesettamaan
7	Standar/pedoman/prosedur kerja/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang bersifat nasional/regional/internasional, termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO & Bagian Organisasi dan Tata Laksana - BHO
8	Pedoman Penyelenggaraan Persidangan dan Rapat BAPETEN	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
9	Nota Kesepahaman/ <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Kerja Sama - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
10	Dokumentasi Hukum (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan peraturan-peraturan yang dijadikan referensi)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO
11	Sosialisasi/penyuluhan/pembinaan hukum a. Berkas yang berhubungan dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum b. Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penyuluhan Hukum	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Hukum - BHO
12	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)),	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
13	Kasus/sengketa hukum a. Pidana 1) Proses verbal mulai dari penyelidikan sampai dengan vonis 2) Berkas pembelaan dan bantuan hukum 3) Telaah hukum dan opini hukum b. Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata:	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>1) Proses verbal mulai dari penyelidikan sampai dengan vonis</p> <p>2) Berkas pembelaan dan bantuan hukum</p> <p>3) Telaah hukum dan opini hukum</p> <p>c. Tata Usaha Negara</p> <p>Berkas tentang kasus/sengketa Tata Usaha Negara:</p> <p>1) Proses verbal mulai dari penyelidikan sampai dengan vonis</p> <p>2) Berkas pembelaan dan bantuan hukum</p> <p>3) Telaah hukum dan opini hukum</p> <p>d. Arbitrase</p> <p>Berkas tentang kasus/sengketa arbitrase:</p> <p>1) Proses verbal mulai dari penyelidikan sampai dengan vonis</p> <p>2) Berkas pembelaan dan bantuan hukum</p> <p>3) Telaah hukum dan opini hukum</p>		<p>eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>			

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
14	Perijinan Berkas perijinan sejak permohonan sampai dengan diterbitkannya surat ijin	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
15	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) a. Hak Cipta b. Hak Paten 1) Paten Biasa 2) Paten Sederhana c. Design Industri d. Design Tata Letak Sirkuit Terpadu	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Hukum - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
III. ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN						
1	Struktur Organisasi a. Pembentukan b. Pengubahan c. Pembubaran	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Ortala - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	Uraian Jabatan dan Tata Kerja	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Ortala - BHO
3	Evaluasi Badan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Ortala - BHO
4	Standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Ortala - BHO
IV. KEARSIPAN						
1	Administrasi persuratan a. Buku Agenda b. Lambar Pengantar / Buku Ekspedisi	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Formulir/catatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen/Arsip					
2	Penyimpanan dan pemeliharaan arsip a. Daftar Arsip b. Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi) c. Daftar pencarian arsip	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
3	Layanan Arsip (peminjaman dan penggunaan arsip)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
4	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
5	Penyusutan Arsip a. Pemindahan arsip in aktif 1) Berita Acara Pemindahan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi),	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none">2) Daftar Arsip yang Dipindahkanb. Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna<ul style="list-style-type: none">1) Berita Acara Pemusnahan2) Daftar Arsip yang Dimusnahkan3) Rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari instansi terkait4) Surat Keputusan Pemusnahanc. Penyerahan arsip statis<ul style="list-style-type: none">1) Berita Acara Serah Terima Arsip2) Daftar Arsip yang Diserahkan		Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			Kepegawaian - Biro Umum
6	<ul style="list-style-type: none">Pembinaan Kearsipana. Apresiasi/Sosialisasi/penyuluhan/kearsipan/lokakarya/workshopb. Bimbingan Teknisc. Supervisi dan monitoring	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
V. KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAN						
1	Telekomunikasi Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
2	Perjalanan Dinas a. Dalam Negeri b. Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
3	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dan fasilitas kantor lainnya	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan – BU
4	Risalah/Notulen Rapat a. Rapat Pimpinan b. Rapat Staf	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
5	Administrasi penyediaan konsumsi dan akomodasi	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum
6	Pengurusan kendaraan dinas a. Pengurusan surat-surat kendaraan dinas b. Pemeliharaan dan perbaikan c. Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
7	Pemeliharaan gedung dan taman a. Pertamanan/landscaping b. Penghijauan c. Perbaikan gedung d. Perbaikan rumah dinas/wisma e. Kebersihan gedung dan taman	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
8	Pengelolaan jaringan listrik, air, telepon dan komputer a. Perbaikan/pemeliharaan b. Pemasangan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
9	<p>Ketertiban dan keamanan</p> <p>a. Pengamanan, penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daftar Nama Satuan Pengamanan 2) Daftar Jaga/Daftar Piket 3) Catatan gangguan/pelanggaran/kejadian 4) Surat Ijin keluar masuk orang atau barang <p>b. Laporan Ketertiban dan Keamanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
10	Administrasi pengelolaan parkir	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
11	Administrasi pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, dan pegawai lainnya	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VI. HUBUNGAN MASYARAKAT						
1	Keprotokolan a. Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) b. Buku Tamu c. Agenda kegiatan Pimpinan BAPETEN d. Kunjungan dinas dalam dan luar negeri 1) Kunjungan dinas Kepala BAPETEN 2) Kunjungan dinas Eselon I 3) Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai e. Daftar nama/alamat kantor/pejabat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol - BHO
2	Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman suara/multimedia 1) Kepala BAPETEN	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol - BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Eselon I 3) Pejabat lain/pegawai					
3	Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi ke-Badan-an a. Kliping koran b. Broseur/leaflet/poster/plakat c. Pengumuman/pemberitaan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol - BHO
4	Hubungan antar badan negara dan badan pemerintahan/instansi					
	a. Hubungan antar badan pemerintah	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Kerja Sama - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	b. Hubungan dengan organisasi sosial/LSM	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Kerja Sama - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	c. Hubungan dengan perusahaan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Kerja Sama - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	d. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Kerja Sama - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah mengenai magang, pendidikan sistem ganda (PSG)/praktek kerja lapangan (PKL)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Kerja Sama - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	f. Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol - BHO
	g. Hubungan dengan media massa 1) Siaran pers/konferensi pers/press release/wawancara 2) Kunjungan wartawan/peliputan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol - BHO
5	Dokumen persidangan dan Rapat (Bahan Sidkab, Rapat Terbatas, Rakor Tingkat Badan, RDP DPR/DPD RI, Pidato Kepala BAPETEN)					
	a. Bahan sidang kabinet	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bahan sidang kabinet

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	b. RDP DPR/DPD RI	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bahan sidang kabinet

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	c. Rakor Tingkat Badan termasuk hasil rumusan dan transkrip	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bahan sidang kabinet

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	d. Bahan rapat terbatas Badan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bahan sidang kabinet

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	e. Pidato Kepala BAPETEN	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bahan sidang kabinet
	f. Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Bidang Pengawasan Tenaga Nuklir	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	- Bagian Program dan Anggaran-BP - Bagian Data dan Informasi - BP
6	Penerbitan majalah, buletin, koran dan jurnal	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang	Bagian Data dan Informasi - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					mengganggu kinerja BAPETEN	
7	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP
8	Pameran/sayembara/lomba/festival/pembuatan spanduk dan iklan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol - BHO
9	Penghargaan/tanda kenang-kenangan Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol - BHO
10	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Humas Dan Protokol – BHO

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VII. KEPUSTAKAAN						
1	Penyimpanan deposit bahan pustaka a. Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit b. Administrasi pengelolaan deposit bahan pustaka	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP
2	Pengadaan dan pengolahan bahan pustaka a. Buku induk koleksi b. Daftar buku terseleksi c. Daftar buku dalam pemesanan d. Daftar buku dan permintaan e. Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah deposit, hibah f. Daftar pengiriman bahan pustaka surplus g. Lembar Kerja Pengolahan BP (Buras, Pengkatalogan) h. <i>Shelf List</i> /Jajaran Kartu Utama (<i>master list</i>)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	i. Daftar Tambahan Buku (<i>Assesion List</i>) j. Daftar/jajaran kendali (subyek dan pengarang)					
VIII. TEKNOLOGI INFORMASI						
	1. Rencana Strategis/master plan pembangunan Sistem Informasi (SIM)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Data dan Informasi - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2. Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi a. Sistem Informasi b. Sistem Aplikasi c. Infrastruktur	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Data dan Informasi - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Perekaman dan pemutakhiran data a. Formulir Isian b. Daftar Petugas Perekaman c. Jadwal Pelaksanaan d. Laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP
	4. Migrasi sistem aplikasi dan data a. Perencanaan migrasi b. Pelaksanaan migrasi c. Berita Acara Kegiatan Migrasi d. Daftar sistem aplikasi dan data yang dimigrasi e. Laporan Hasil Migrasi	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP
	5. Dokumen hosting a. Formulir permintaan hosting b. Laporan hasil uji kelayakan c. Laporan pelaksanaan hosting	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	6. Layanan back-up data digital	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Data dan Informasi - BP
IX. PENGAWASAN						
	1. Rencana Pengawasan a. Rencana strategis pengawasan b. Rencana kerja tahunan c. Rencana dan penetapan kinerja tahunan d. Rakor pengawasan tingkat nasional	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Inspektorat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2. Pelaksanaan Pengawasan					
	a. 1) Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan hasil Pemeriksaan(LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut 2) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Inspektorat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	b. 1) Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan hasil Pemeriksaan(LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut 2) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Inspektorat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	c. Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Inspektorat
	d. Laporan pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan					
	e. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara					
	f. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Badan					
	g. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)					

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
X. PERLENGKAPAN						
	1. Rencana Kebutuhan Barang a. Unit Kerja b. Badan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU
	2. Pengadaan Barang a. Telaahan pelaksanaan lelang/pemilikan/penunjukan langsung b. Dokumen Lelang 1) Barang Inventaris Kantor/barang bergerak (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang 2) Barang Investasi (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan,	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	sampai dengan kontrak dan serah terima barang					
	3. Penyimpanan barang dan distribusi a. Penyimpanan inventaris kekayaan negara 1) Surat bukti barang masuk 2) Surat bukti pengeluaran barang b. Pendistribusian 1) Surat Jalan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) a. SIMAK BMN	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	b. Pembukuan BMN 1) Daftar Barang Kuasa/Pengguna 2) Kartu Identitas Barang 3) Buku Penerimaan PNBPN	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	c. Daftar Barang Ruangan (DBR)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU
	d. Inventarisasi BMN 1) Keputusan Pembentukan Tim 2) Rencana kerja pelaksanaan inventarisasi 3) Kerta Kerja Inventarisasi 4) Berita Acara Inventarisasi 5) Daftar Inventaris/Buku Barang/ daftar barang lainnya 6) Laporan Hasil Inventarisasi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	e. Laporan BMN 1) Laporan Kondisi Barang 2) Laporan Barang Kuasa Pengguna 3) Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal dan Internal 4) Laporan Persediaan Habis Pakai 5) Laporan Persediaan Tidak Habis Pakai	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Rumah Tangga & Pengamanan - BU

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
XI. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
	1. Pedoman-pedoman kediklatan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	2. Kurikulum-kurikulum diklat	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	3. Modul-modul diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	4. Panduan Fasilitator	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	5. Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
					mengganggu kinerja BAPETEN	
	6. Notulen sosialisasi/repat koordinasi kebijakan diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	7. Akreditasi Lembaga Diklat a. Surat Permohonan Akreditasi b. Laporan Verifikasi lapangan c. Berita Acara Rapat Verifikasi d. Berita Acara Rapat Tim Penilai e. Surat keputusan Penetapan Akreditasi f. Sertifikat Akreditasi g. Laporan Akreditasi Lembaga Diklat	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	8. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kearsipan a. Surat Permohonan Sertifikasi b. Laporan Verifikasi lapangan c. Berita Acara Rapat Verifikasi d. Berita Acara Rapat Tim Penilai e. Surat keputusan Penetapan Sertifikasi f. Sertifikat Sertifikasi g. Laporan Sertifikasi Lembaga Diklat	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	9. Sistem Informasi Diklat <ul style="list-style-type: none"> a. lembaga diklat b. Data prasarana diklat c. Data sarana diklat d. Data pengelola diklat e. Data penyelenggara diklat f. Data widyaiswara g. Data program diklat 	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	10. Registrasi Sertifikasi/STTPL Peserta Diklat <ul style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan kode registrasi b. Buku registrasi c. Surat penyampaian kode registrasi 	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	11. Rencana Tahunan Diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	12. Rencana penyelenggaraan diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	13. Penyelenggaraan diklat a. Surat pemanggilan peserta b. Surat Keputusan Tim Penyelenggara Diklat c. Surat Keputusan Tim Pengajar Diklat d. Panduan Diklat e. Laporan panitian penyelenggara diklat f. Sambutan pembukaan penyelenggaraan diklat g. Daftar Peserta Diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	h. Daftar Hadir Widyaiswara i. Bahan ajar diklat j. Daftar Hadir Peserta Diklat k. Hasil formulasi evaluasi peserta diklat l. Sertifikasi/STTPL m. Sambutan penutupan diklat					
	14. Laporan penyelenggaraan diklat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Balai Diklat
	15. Evaluasi penyelenggaraan diklat	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	16. Evaluasi alumni pasca diklat	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Balai Diklat

NO	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF KEUANGAN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
A	RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN) DAN RUU APBN-P					
	1. Penyusunan RAPBN a. Kebijakan Umum, RENSTRA, Strategis dan Prioritas - Dokumen Rencana Strategis atas Rencana Kerja Jangka Panjang atau Rencana Kerja Lima Tahun - Dokumen Rencana Kerja Tahunan BAPETEN b. Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) c. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>2. Penyampaian RAPBN kepada DPR-RI</p> <p>a. Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Undang-undang APBN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota Keuangan - Materi RAPBN dari Lembaga Negara dan Badan Pemerintah (LNBP) <p>b. Pembahasan RAPBN oleh Komisi DPR</p> <p>c. Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan masing-masing Fraksi - Jawaban pemerintah atas tanggapan Fraksi-fraksi <p>d. Nota Jawaban DPR-RI terkait dengan pembahasan RUU APBN (Per Komisi)</p>	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
	4. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional kegiatan (POK) dan Revisinya mulai dari usulan, notulen sampai dengan penetapan DIPA, POK dan revisinya	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
	5. Usulan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RUU APBN-P)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	6. Notulen pembahasan RUU APBN-P oleh Pemerintah dan DPR	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), &	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	7. Notulen Rapat Paripurna Persetujuan RUU APBN-P: <ul style="list-style-type: none">- Tanggapan masing-masing fraksi- Jawaban Pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	8. Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (UU APBN-P)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
	9. Keputusan Presiden tentang Rincian APBN-P	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP
	10. Nota Jawaban DPR-RI terkait dengan Pembahasan RUU APBN-P (Per Komisi)	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Program & Anggaran - BP

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
B	PELAKSANAAN KEGIATAN					
	1. Ketentuan/Peraturan Menteri Keuangan menyangkut pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum
	2. Dokumen Realisasi Pendapatan a. Surat Setoran Pajak (SSP) b. Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> c. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) d. Bukti Setor Sisa Anggaran Lebih atau Bukti Setor Pengembalian Belaja e. Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank f. Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari masing-masing Satuan Kerja g. Dokumen Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Pajak meliputi Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh), Pasal 25, 29, 21 h. Piutang Negara i. Pengelolaan Investasi j. Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara 		<p>(Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>		fungsi dan tugas BAPETEN	

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>3. Belanja</p> <p>a. Dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa termasuk dokumen-dokumen</p> <p>1) Barang Habis Pakai</p> <p>2) Barang Inventaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barang Bergerak/Barang Inventaris - Tanah dan Bangunan - Jasa - Software Komputer <p>Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman Lelang - Dokumen Prakualifikasi - Dokumen Peninjauan Lapangan - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan - Berita Acara Pelelangan 	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none">- Usulan calon pemenang- Penetapan Pemenang- Surat Perintah Kerja (SPK)- Kontrak/Addendum Kontrak <p>b. Dokumen Pembayaran Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengajuan kebutuhan penarikan kas- Bukti-bukti tagihan dari pihak ke tiga- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)- Surat Perintah Membayar (SPM)- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) <p>c. Dokumen Tata Usaha Anggaran</p> <p>d. Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium</p> <p>e. Kartu Gaji</p> <p>f. Bukti setor iuran/kontribusi pemerintah RI kepada Badan/Organisasi Internasional</p> <p>g. Dokumen penyertaan modal pemerintah</p>					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	h. Dokumen pembayaran hutang negara antara lain tagihan dari nagara kreditur, bukti transfer, nota debet dari Bank Indonesia, dll					
	<p>i. Dokumen Akuntansi Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Berita Acara Pemeriksaan Kas- Kas/Register Penutupan Kas- Arsip Data Komputer (ADK)- Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan KPPN <p>j. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)- Neraca- Laporan Arus Kas- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
C	BANTUAN/PINJAMAN LUAR NEGERI					
	1. Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman Luar Negeri (<i>Blue Book</i>)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2. Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (<i>green book</i>)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Dokumen Memorandum of Understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerusan, Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	5. Alokasi dan relokasi penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<p>6. Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya</p> <p>a. <i>Reimbursement</i></p> <p>b. <i>Direct Payment/ Transfer Procedure</i></p> <p>c. <i>Special Commitment L/C Opening</i></p> <p>d. <i>Special Account/ Imprest Fund</i></p> <p>e. Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri</p> <p>f. <i>Notice of Disbursement</i></p>	Terbatas	<p>Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)</p>	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	7. Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	8. Realisasi pencairan dana pinjaman/Hibah Luar Negeri yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, Berita Acara dan data pendukung	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	9. Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) meliputi: No Objection Letter (NOL), <i>Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization</i> (WA), <i>Statement of Expenditure</i> (SE)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	10. <i>Staff Appraisal Report</i>	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	11. Report/Laporan yang terdiri dari: <i>a. Progress Report</i> <i>b. Monthly Report</i> <i>c. Quarterly Report</i> <i>d. Final Report/Completion Report</i>	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	12. Laporan Hutang Negara a. Laporan Pembayaran Hutang Negara b. Laporan Posisi Hutang Negara	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	13. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
D	PENGELOLAAN APBN/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)					
	Keputusan Pengguna Anggaran tentang penetapan: 1. Kuasa Pengguna Anggaran 2. Kuasa Pengguna Barang/Jasa 3. Pejabat Pembuat Komitmen 4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji 5. Pejabat Penandatanganan SPM 6. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran 7. Pengelola Barang 8. Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB) 9. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) 10. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 11. Panitia Penerimaan Barang dan Jasa termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
E	SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)					
	1. Manual implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Kebijakan Akuntansi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Laporan Realisasi Sementara APBN	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
F	PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA					
	1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2. Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional: a. LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) b. MHP (Memorandum Hasil Pemeriksaan) c. Tindak Lanjut/Tanggapan LHP	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4. Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara a. Tuntutan Perbendaharaan b. Tuntutan Ganti Rugi	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Keuangan - Biro Umum

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF KEPEGAWAIAN (PNS DAN PEJABAT NEGARA)

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	1. Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian a. Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik b. Penyusunan kebijakan c. Perumusan kebijakan d. Pemberian masukan dan dukungan e. Penetapan kebijakan f. Peraturan Bersama/ <i>Memorandum of Understanding</i>	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	2. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara a. Perencanaan kebutuhan ASN 1) Bahan penyusunan rencana kebutuhan 2) Analisis kebutuhan - Aparatur Sipil Negara - Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPNS) 3) Pengolahan data kebutuhan b. Perencanaan Pertimbangan Formasi c. Penetapan kebutuhan Aparatur Sipil Negara d. Standarisasi Jabatan	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	3. Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) a. Formasi ASN - Usulan dari Unit Kerja - Usul Permintaan Formasi kepada Menpan dan RB serta Kepala BKN - Persetujuan Formasi dari Menpan dan RB - Penetapan Formasi - Penetapan Formasi Khusus	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
	b. Pengadaan ASN 1) Proses rekrutmen ASN - Pengumuman - Seleksi administrasi - Pemanggilan peserta tes - Pelaksanaan ujian tertulis - Keputusan hasil ujian - Wawancara	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Penetapan Pengumuman Kelulusan 3) Berkas lamaran yang tidak diterima 4) Nota Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP 5) Nota Usul Pengangkatan CASN Menjadi ASN lebih 2 Tahun 6) Nota Usul Pengangkatan ASN 7) Berkas Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi)					
	4. Pengembangan karier a. Usulan tugas belajar/Ijin belajar/Diklat//kursus/magang/ujian dinas/Praktek kerja dari instansi lain 1) Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan 2) Pelaksanaan 3) Pelaporan	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	4) Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL/Sertifikat) b. Usulan penyesuaian ijazah c. Surat Perintah/Surat Tugas/SK/Surat Ijin d. Laporan kegiatan pengembangan diri e. Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja f. Angka Kredit 1) Pengajuan daftar usul penetapan angka kredit 2) Penilaian daftar usul penetapan angka kredit g. Pakta Integritas Pegawai h. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) i. Disiplin Pegawai					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	j. Daftar hadir k. Rekapitulasi daftar hadir l. Berkas Hukuman Disiplin m. Penghargaan dan Tanda Jasa	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
	5. Penyelesaian Pengelolaan Keberatan Pegawai	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	6. Mutasi Pegawai a. Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Unit Kerja, Mutasi antar Perwakilan, Pemindahan Sementara - Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	b. Mutasi Keluarga 1) Surat izin pernikahan/perceraian 2) Surat penolakan izin pernikahan/perceraian 3) Akta nikah/cerai 4) Akta kelahiran anak 5) Surat keterangan meninggal dunia	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
	c. Usul Kenaikan Pangkat/ Golongan/ Jabatan					
	d. Usul Pengangkatan, Pembebasan Sementara dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/ Fungsional					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	e. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/ Kedudukan Hukum Pegawai					
	f. Peninjauan Masa Kerja					
	g. Berkas Baperjakat 1) Sebelum pelantikan pejabat	Rahasia	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Jabatan Pimpinan Tinggi	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy.	Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	2) Setelah Pelantikan pejabat	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum
	7. Administrasi Pegawai					
	a. Surat Perintah Dinas/ Surat Tugas b. Cuti Besar c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	d. Cuti Alasan Penting e. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) f. Dokumentasi Identitas Pegawai g. Usul penetapan Kartu Pegawai/ KPE/ Karis/ Karsu h. Keanggotaan Organisasi Profesi / Kedinasan i. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)/ SPT Tahunan/ NPWP j. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) k. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			(Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			
	8. Kesejahteraan Pegawai a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai b. Berkas tentang Bimbingan Rohani Pegawai c. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai d. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan e. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial f. Berkas tentang Layanan Rekreasi, Kesenian dan Olahraga g. Berkas tentang Layanan Beras h. Berkas tentang Layanan Pengurusan Jenazah i. Berkas tentang Layanan Antar Jemput j. Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas	Biasa / Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	9. Pemberhentian Pegawai Tanpa Hak Pensiun	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	10. Perselisihan/ Sengketa Kepegawaian	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	11. Usul Pemberhentian Pegawai dan Penetapan Pensiun Pegawai/ Janda/Duda dan PNS yang tewas	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) / eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	12. Berkas Perseorangan PNS <ul style="list-style-type: none"> - Lamaran yang diterima - Nota Penetapan NIP dan kelengkapannya - Nota Persetujuan/ Pertimbangan Kepala BKN 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum dan Personal Pegawai
	<ul style="list-style-type: none"> - SK Pengangkatan CPNS - Hasil Pengujian Kesehatan - SK Pengangkatan PNS - SK Kenaikan Pangkat - Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Pelantikan 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum dan Personal Pegawai

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - SK Pengangkatan Dalam atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional - SK Perpindahan Wilayah Kerja - SK Perpindahan Antar Instansi - SK Peninjauan Masa Kerja - SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) - Berita Acara Pemeriksaan - SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS - SK Perbantuan/ Dipekerjakan di Luar Instansi Induk - SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/ Dipekerjakan - SK Pemberian Uang Tunggu - SK Pemberhentian Sebagai PNS 					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - SK Pemberhentian/ Pembebasan Sementara - SK Pengangkatan/ Pemberhentian sebagai Pejabat Negara - SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena Diangkat sebagai Pejabat Negara - SK Pengalihan PNS+C636 - Surat Keterangan Pernyataan Hilang - Surat Keterangan Kembalinya PNS yang Dinyatakan Hilang - SK Penggantian Nama - Surat Perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran - Akta Nikah/ Cerai - Akta Kelahiran - Isian Formulir PUPNS - Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji PNS dan Jabatan 					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol - Surat Keterangan Meninggal Dunia - Surat Keterangan Mutasi Keluarga - Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan - Penetapan Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional - Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus - Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala - Surat Tugas/Ijin Belajar Dalam/Luar Negeri - Surat Ijin Bepergian ke Luar Negeri - Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS - Kartu Induk Pegawai - Ijasah/Sertifikat - SK Penempatan/Penarikan Pegawai - SK Pengangkatan pada Jabatan Kedinasan di luar Instansi induk 					

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Pertimbangan Status PNS - SK Pengaktifan Kembali sebagai PNS - Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah - SK Pensiun 	Biasa/Terbuka	Umum	Pejabat Administrator (Eselon III)	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas BAPETEN	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum dan Personal Pegawai
	13. Berkas Perseorangan Kepala BAPETEN	Terbatas	Penentu kebijakan (Pejabat Pimpinan Tinggi), Pelaksana Kebijakan (Pejabat Administrator (Eselon III)), Pengawas internal (Inspektorat) /	Pejabat Administrator (Eselon III)	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian - Biro Umum dan Personal Kepala BAPETEN

NO.	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	PEJABAT YANG BERWENANG	PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
			eksternal (BPK/BPKP), & penegak hukum (Aparat Kepolisian, Kejaksaan, KPK)			

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JAZI EKO ISTIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

